



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Blacklist Kontraktor Tak Bayar Temuan BPK

KEPAHIANG - Pemkab Kepahiang hingga saat ini masih menyisakan sejumlah utang. Itu terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Bengkulu atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019 maupun 2020.

Kendati salah satu langkah yang akan diambil Pemkab Kepahiang adalah dengan melakukan kerja sama penagihan ke Seksi Datun Kejari Kepahiang melalui Surat Kuasa Khusus (SKK). Selain itu juga, kepada sejumlah perusahaan rekanan atau pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan temuan BPK

tersebut, diminta untuk segera melunasi utangnya.

Rekanan yang tidak melunasi utang yang masuk dalam temuan BPK tersebut, Pemkab Kepahiang akan memasukkannya dalam daftar *blacklist*. Sehingga ke depan perbuatan yang serupa tidak terulang.

Wakil Bupati (Wabup) Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP mengungkapkan, pengelolaan keuangan untuk 2 tahun terakhir masih menyisakan beberapa utang atas temuan BPK. Dengan itu pula dirinya mendukung kebijakan yang akan diambil Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Kepahiang untuk melakukan SKK dengan Seksi Datun Kejari Kepahiang. "Kalau untuk total pastinya saya tidak mengetahui, hanya dipastikan memang pembayarannya belum lunas 100 persen dan masih banyak tersisa," kata Wabup.

Ia juga meminta pihak ketiga atau kontraktor yang masih mempunyai tunggakan pembayaran yang belum lunas, supaya di-blacklist dengan harapan kejadian serupa tidak terulang kembali. Ini juga menjadi pembelajaran bagi pihak rekanan lainnya. Karena ketika tetap diberikan pekerjaan, dimungkinkan hal serupa akan kembali terjadi.

"Kontraktor yang tidak membayar

utang temuan BPK di-blacklist saja. Tidak usah lagi diajak bekerja sama. Karena ketika kembali diberikan pekerjaan kejadian serupa bisa terulang. Pada prinsipnya pengelolaan keuangan yang sudah menjadi temuan itu sifatnya wajib untuk dikembalikan," demikian Wabup.

Untuk diketahui, sederet temuan BPK RI atas pengelolaan anggaran Pemkab Kepahiang TA 2020. Diantaranya di Dinas PU Kepahiang itu terdapat 2 item yakni temuan pembangunan jalan lingkungan Rp 24 juta, tetapi sudah lunas 100 persen. Sementara untuk temuan Rp 361.940.679 baru dilakukan angsuran dan belum

lunas 100 persen serta sejumlah temuan lainnya.

Kemudian temuan anggaran BBM di Setdakab Kepahiang senilai Rp 57.811.895 belum lunas 100 persen dan hanya menyisakan sedikit lagi. Disparpora Kepahiang juga memiliki temuan sebesar Rp 356.4 juta sudah diangsur tapi belum 100 persen, dan di Sekretariat DPRD ada temuan sekitar Rp 121.997.946 yang belum lunas namun sudah diangsur.

Sementara itu untuk temuan TA 2019 masih menyisakan temuan Masjid Agung Kepahiang senilai Rp 540 juta dan tugu Kopi Rp 60 juta. (sly)